

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI STUDI KOMPARATIF

Mardianton¹, Hanifa Suwita², Ira Sumarni³, Faisal Efendi⁴

Corresponding Author's : STAI Balaiselasa, Sumatera Barat, Indonesia

Email : mardianton@stai-bls.ac.id

Copyright © 2023



Abstract: *This research aims to compare patterns of accountability and financial management of the Mosque through a comparative study phenomenological approach. Type of field research with a qualitative descriptive approach. The analysis technique uses comparative study phenomenology. The results of the study, Al-Mashun Grand Mosque and Medan Great Mosque have not fully implemented the accountability of their financial management, although they do not have a written SOP, but the implementation of management activities follows the laws and traditions of the previous mosque management. The Great Mosque's financial statements are audited by a public accountant every 2 months, while the Al-Mashun Grand Mosque's financial statements have never been audited, but the fairness of the report can be evaluated by Jama'ah exclusively. there is a separation of functions in the Mosque's cash expenditure which is kept in a bank account. The financial management of the Mosque has been transparent with the accessibility of the Mosque report by the Jama'ah.*

Keywords: *Accountability, Financial Management, Transparency*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskrip kualitatif. Teknik analisis menggunakan fenomenologi studi komparatif. Hasil penelitian, Masjid Raya Al-Mashun serta Masjid Agung Medan belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya, walaupun tidak mempunyai SOP tertulis, tetapi pelaksanaan kegiatan pengurus mengikuti hukum dan tradisi kepengurusan Masjid yang ada sebelumnya. Laporan keuangan Masjid Agung diaudit akuntan publik 2 bulan sekali, sedangkan laporan keuangan Masjid Raya Al-Mashun belum pernah diaudit, tetapi kewajaran laporan bisa dievaluasi Jama'ah secara eksklusif. terdapat pemisahan fungsi di pengeluaran kas Masjid yang disimpan pada rekening bank. Pengelolaan keuangan Masjid telah transparan dengan dapat diaksesnya laporan Masjid oleh Jama'ah..

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Transparansi

PENDAHULUAN

Masjid merupakan entitas dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya seperti perusahaan atau entitas sektor publik lainnya. Menurut Booth, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan. (Simanjuntak 2011)

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di dua Masjid, yaitu Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan. Kedua Masjid tersebut berlokasi di Medan. Tujuan penelitian ini membandingkan pola akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid yang masih jarang diteliti, sehingga manfaat secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran agar lebih mengetahui pola akuntabilitas dan pengelolaan keuangan melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif. Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan merupakan Masjid terbesar di kota Medan. Dimana di kedua masjid ini

banyak melakukan acara keagamaan seperti acara-acara besar, pengajian dan tempat sekaligus belajar para anak-anak dan organisasi keagamaan. Tidak sedikit dana yang ada di kedua masjid ini karena berdasarkan informasi yang di dapat dari pihak pengurus masjid dan masyarakat sekitar banyak mengatakan bahwa hamper setiap hari, bulan, bahkan tahun selalu ada kas yang masuk. Donatur atau para penyumbang yang memberikan dana tersebut melalui sedekah, infak, dan sumbangan para jama'ah dengan jumlah yang sangat besar. Setiap masjid memiliki cara pengelolaannya sendiri-sendiri, mulai dari program-program yang ada sampai dengan pengelolaan keuangannya juga. (Khairaturrahmi, 2018)

Pentingnya pengelolaan yang benar merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengurus masjid dalam meningkatkan kualitas program masjid untuk memakmurkan masyarakat, hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan pengurus harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Semakin banyak program-program yang terealisasi dari program yang ada maka akan semakin baik pengelolaan masjid tersebut dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana tersebut diperlukan untuk

mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid. (Fitriyani, 2018)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. (Kasmir 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun

daerah. Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, sering kali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Penting bagi masjid untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya untuk membangun kepercayaan publik. Jika laporan keuangan tidak transparan maka masyarakat akan menurunkan tingkat kedermawanan kepada Masjid tersebut dan beralih pada Masjid lain yang lebih dipercaya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Abdul Latif (Latif 2014) yaitu Akuntabilitas dan Pengelolaan keuangan di Masjid (Studi kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo). Sedangkan peneliti sekarang mengganti objek penelitian untuk diteliti, sehingga peneliti sekarang mengembangkan dan merubah objek penelitian menjadi, "Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi

Kasus Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan)”.
Dalam penelitian ini penulis melakukan review yang sejenis dengan pembahasan, penulis menggunakan review dengan aplikasi *Harzing's Publish or Perish* dengan kata kunci (Keywords) *Accountability and Financial Management in the Mosque*. Review dimuat 100 jurnal yang sejenis, namun dalam penelitian yang ditemukan belum banyak yang membahas dengan metode Fenomenologi.

KAJIAN TEORI

Istilah masjid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata “Sajada, yasjudu, sajan”. Kata sajada artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk dan penuh hormat dan ta’dzim. Untuk menunjukan suatu tempat, kata sajada diubah bentuknya menjadi “Masjidun” artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Kemudian dijelaskan pula bahwa secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Masjid mempunyai kaitan erat dengan keimanan dan pembinaan umat bagi kaum muslimin agar dapat memberikan peranan yang dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan iman inilah yang menentukan persatuan umat yang akan memberikan kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam yang berdasarkan tauhid (Kasmir 2010).

Mustofa (2007) dalam Manajemen Masjid mengemukakan beberapa fungsi masjid: 1) Sebagai wahana konsultasi

keagamaan masalah keluarga dan masalah sosial. 2) Sebagai wahana pengembangan pendidikan masyarakat. 3) Sebagai wahana pengembangan bakat dan keterampilan. 4) Sebagai wahana pengentasan kemiskinan. 5) Sebagai wahana meringankan beban orang kurang mampu. 6) Sebagai wahana pembinaan generasi muda. 7) Sebagai wahana mitra pengembangan perekonomian masyarakat. 8) Sebagai wahana menyehatkan masyarakat. Selain itu, Ayub (1996) dalam buku Manajemen menjabarkan sembilan fungsi besar masjid yaitu: 1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2) Masjid adalah tempat kaum muslimin untuk beritikaf, membersihkan diri, mengembangkan batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan perolongan. 5) Masjid adalah tempat untuk membina keutuhan ikatan jama’ah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 6) Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. 7) Masjid adalah tempat pembinaan dan

pengembangan kader-kader pemimpin umat. 8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagi kannya. 9) Masjid sebagai tempat untuk melaksanakan pengaturan dan supervise social. (Bahrudin, Ni Luh Gd Erni Sulindawati 2017)

Transparansi di masjid Raidhatul Irfan hanya melalui pengumuman saldo dana masjid setiap jum'at serta melalui mading (majalah dinding) yang setiap bulan dilaporkan yang bisa ditinjau oleh seluruh jamaah masjid.. Akuntabilitas Dana Masjid pada hal ini pengelolaan dana masjid bisa dipertanggungjawabkan pada hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan dan pelaporannya (Ismet Ismatullah 2018) perilaku praktek akuntansi Masjid Nasional Al akbar Surabaya dijamin sang kualitas keimanan yang baik yang didukung sang struktur organisasi yang diisi sang sumberdaya manusia kompeten. Kualitas keimanan yg mensugesti praktek akuntansi ini berangkat dari penetapan nilai-nilai jujur, Istiqomah, Uswah, Mas'uliah dan Li jami' il-Ummah menjadi pedoman sikap bagi para Pengelola Masjid. Prinsip Akuntabilitas dalam praktek akuntansi Masjid Nasional Al besar Surabaya ditinjau menjadi bagian dari ibadah. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal, yakni kepada Badan Pengawas Masjid Nasional Al akbar Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Allah SWT menjadi upaya menerima ridho-Nya, sedangkan pertanggungjawaban horizontal ke- di para donator masjid dan rakyat.

Penerapan transparansi laporan keuangan Masjid Nasional Al akbar. Surabaya dilakukan menggunakan menyediakan berita yg jelas tentang mekanisme- prosedur, porto-biaya, dan tanggung jawab Badan Pengelola Masjid, anugerah kemudahan akses informasi laporan keuangan, penyusunan prosedur pengaduan Bila terjadi pelanggaran peraturan yg dilanggar, serta peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintahan. tetapi demikian, laporan keuangan Masjid Nasional Al akbar Surabaya belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen yang tentunya mengurangi nilai akuntabilitas laporan keuangan Masjid Nasional Al besar Surabaya (Rahayu 2014).

Pengelola sudah mementingkan kepentingan dan kemakmuran masjid dibandingkan kepentingan individu. Penelitian juga membagikan praktik akuntabilitas yang dijalankan menggunakan akuntabilitas kejujuran dan aturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan keuangan. buat mengatasi masalah yang terdapat dalam pengelolaan keuangan masjid, usaha kan pada masa yang akan kalangan pendidik akuntansi khususnya akuntansi Islam secara proaktif di masa yang akan datang mengusahakan buat membuat training tentang manajemen masjid terbaru khususnya pengendalian intern, pengelolaan keuangan masjid serta penyusunan laporan keuangan

masjid dan publikasi laporan keuangan masjid dan aktivitas atau program masjid melalui internet. training serta pendampingan sebaiknya dilaksanakan pada sejumlah kecil masjid, agar lebih efektif (Rini 2018).

Pengelolaan keuangan masjid menyampaikan tambahan pemahaman bagi peserta tentang pentingnya melakukan pencatatan keuangan masjid secara sistematis serta konsisten. Peserta memperoleh pengalaman melakukan pencatatan keuangan masjid secara sederhana, sistematis dan terstruktur sehingga dapat diterapkan pada pengelolaan keuangan masjid pada daerahnya masing-masing. Dokumen pencatatan pengelolaan masjid sederhana yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan masjid antara lain kitab kas dan anggaran keuangan (Dewi and Renggana 2022).

Tiga puluh tujuh masjid yang terdapat di Kabupaten Wonosobo 70% sudah melakukan proses pencatatan laporan keuangan yang sudah sinkron dengan kriteria atau indikator yang ada. Walaupun ada yang secara rutin melakukan proses pencatatan laporan keuangan dan ada yang tidak rutin. asal 37 masjid terdapat 70% yang telah melakukan praktek transparansi kepada masyarakat setempat dan proses transparansi ini kebanyakan memakai media tulis dengan cara memanfaatkan papan info yang ada, karena menurut beberapa pengurus masjid keliru satu cara ini yang paling efektif buat diterapkan menggunakan

menulis laporan keuangan pada papan informasi agar bisa pada akses kapan saja serta dengan siapa aja baik pihak warga setempat hingga para donatur-donatur yang menyumbangkan uangnya. Laporan keuangan berasal 37 masjid yang ada pada Wonosobo 70% yang melakukan akuntabilitas sinkron dengan kriteria. Melihat data tersebut berarti tingkat akuntabilitas masjid yang terdapat pada Wonosobo relatif tinggi. Walaupun tingkat pemahaman serta sumber daya manusianya sangat minim pada pembuatan laporan keuangan tetapi karena agama dan kejujuran yang dibangun maka menghasilkan akuntabilitas yang bagus (Haryanti and Kaubab 2019).

Pengurus mengelola keuangan Masjid Agung Lamongan menggunakan sangat hati-hati serta dibukukan menggunakan cara sederhana yakni sebatas pengeluaran dan pemasukan kas selesainya itu para pengurus Masjid Agung Lamongan memaparkan akibat pengelolaan tadi pada masyarakat. dalam hal ini penulis menemukan bahwasanya Masjid Agung Lamongan untuk pembuatan laporan keuangannya masih sederhana yaitu pencatatan kas masuk serta kas keluar sebagai akibatnya tidak sinkron dengan PSAK 45, dan para pengurus Masjid Agung Lamongan belum menerapkan PSAK 45 sebab para pengurus masih merasa asing menggunakan baku tadi. Sedangkan dalam perilaku akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pengurus, warga terdapat yang telah puas serta terdapat yang belum puas. Pengurus

Masjid Agung Lamongan diberikan jujur dari masyarakat untuk mengelola keuangan Masjid Agung Lamongan dan jujur tersebut wajib dipertanggung jawabkan menggunakan baik. dengan adanya beberapa problem yang ada perlu adanya training tentang pengelolaan keuangan atau pelaporan keuangan yang sinkron bagi masjid, dengan demikian sdm yg ada pada Masjid Agung Lamongan semakin berkompeten dalam mengelola keuangannya, pencatatannya, dan dalam pelaporannya (Aisyah 2019).

Masjid sudah memiliki laporan keuangan menjadi bentuk pertanggung jawaban. Pengelola keuangan masjid telah memenuhi nilai-nilai prinsip akuntansi syariah: pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga prinsip tadi mempunyai keterkaitan dengan sifat yang dimiliki sang rasul: sidiq, jujur, thabligh dan fathanah. Meskipun, pada penelitian ini menemukan bahwa praktik akuntansi masih belum sinkron menggunakan baku akuntansi bagi entitas nirlaba. Hal ini karena bagian pengelola keuangan tidak mempunyai latar belakang keuangan. Publikasi keuangan masjid sebagian akbar diumumkan pada waktu menjelang shalat jum'at dan ditempelkan pada mading (Mahardika et al. 2022).

Peserta pelatihan sangat antusias waktu mengikuti workshop serta training. Para peserta bisa melihat manfaat workshop ini, yakni menambah pengetahuan di bidang manajemen pengelolaan keuangan

mesjid, khususnya akuntansi mesjid. sesuai sharing yang dilaksanakan di saat diskusi, tak terdapat kesanburuk berasal peserta selama aplikasi workshop, baik berasal segisarana dan prasarana juga penyampaian materi, hanya saja perlu didesain dalam skala yg lebih luas. dedikasi selanjutnya permanen diarahkan pada sharing problem keilmuan dan praktik akuntansi mesjid, khususnya tentang pembuatan perangkat lunak system info akuntansi mesjid. oleh karena itu, pengembangan dedikasi selanjutnya kemungkinan akan diarahkan di pembuatan aplikasi sistem info akuntansi mesjid secara online (Ahyaruddin, 2017).

Masjid Jami' di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas pada pelaporan keuangan nya, walaupun tidak mempunyai SOP tertulis, namun pada pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti hukum-hukum yg telah sebagai tradisi dalam kepengurusan masjid. Pengurus menghasilkan laporan keuangan masjid berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada bentuk single entry yang diserahkan sang pengurus pada jamaah dan internal kepengurusan, serta beberapa pihak tertentu lainnya. Laporan keuangan masjid tidak diaudit sang akuntan publik, tetapi kewajaran laporan bisa dinilai oleh jamaah secara pribadi. Pelaporan keuangan masjid telah transparan menggunakan dapat diaksesnya laporan keuangan masjid oleh jamaah melalui publikasi dan media yang

dilakukan dan disediakan sang pengurus, pengurus pula mendapatkan saran serta kritik berasal jamaah (Maulana 2020).

Akuntansi dan Teologi

Teologi dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Theologi* yang terdiri dari kata *theos* yang berarti Tuhan atau dewa, dan *logos* yang artinya ilmu. Sehingga teologi adalah pengetahuan ketuhanan. Menurut Resse, teologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *theology* yang artinya *discourse or reason concerning god* (ceramah atau pemikiran tentang Tuhan) dengan kata-kata ini Resse lebih jauh mengatakan, “teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Eliade pada Tahun 1959. Teologi adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang aqidah imani yang di perkuat dalil-dalil rasional (Budiman 2011).

Kebanyakan ilmuwan akuntansi mengikuti mainstream penelitian akuntansi yakni penelitian yang berbasis pada metode kuantitatif. Selain itu, pemahaman ilmuwan akuntansi kebanyakan dibangun berdasarkan pondasi kacamata kuda yakni akuntansi hanya bekerja sekitar organisasi laba atau organisasi nirlaba yang bebas dari pengaruh teologi maupun ideologi tertentu. Menurut pendapat Eliade menyatakan bahwa, “bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu

didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual”. Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual. Persepsi entitas keagamaan seperti gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan di lembaga keagamaan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan

bawahan (Nurlailah 2014). Praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Padahal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid, perlu untuk melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Masjid adalah Baitullah (rumah Allah) yang dibangun sebagai sarana bagi umat untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah-Nya dengan baik serta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Masjid merupakan entitas publik tempat nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya. Booth menjelaskan bahwa, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu

dipraktekkan. Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggung jawaban atau accountability. Akuntansi syariah pada intinya yaitu akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban. (Simanjuntak 2011) Oleh karena itu, pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh dan ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Pengelolaan Keuangan Masjid

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggung jawaban. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggung jawaban penggunaan sumber penerimaan dalam hal ini sumber penerimaan masjid. Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at.

Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbikan gedung masjid. Penerimaan masjid yang bersumber dari penerimaan-penerimaan berupa sumbangan dari masyarakat dan jama'ah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masjid baik untuk pengeluaran rutin maupun yang tidak rutin. Pengeluaran rutin berupa pembayaran biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap jama'ah karena pengeluaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan jama'ah sebagai bentuk pelayanan masjid dan pertanggung jawabannya terhadap masyarakat dan jama'ah masjid. Selain pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas, pengurus masjid perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada jama'ah yang secara tidak langsung memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat

seederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengawasan pengelolaan masjid dilakukan oleh takmir masjid.

Takmir masjid mengelola masjid menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas masjid yaitu peralatan yang dibutuhkan masjid secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola masjid. Jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab. (Latif 2014)

Transparansi Keuangan Masjid

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. (Raharjo Adisasmita 2011) Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan

biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Prabowo 2017)

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara mengikuti hukum dan peraturan. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan serta mudah dimengerti. Transparansi semakin urgen dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan

terhadap akses informasi. Aliran informasi tidak pernah secara total tanpa hambatan, karena manajemen yang tidak transparan dalam mengelola organisasi. Transparansi diterima luas masyarakat, karena transparansi memberikan harapan terhadap efisiensi, membangun kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi. Transparansi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan (Aprilia 2017)

METODE PENELITIAN

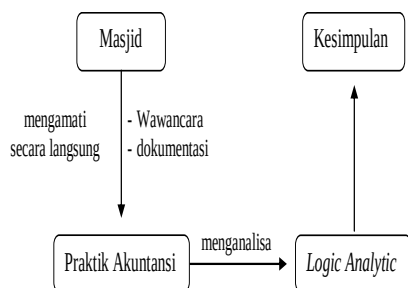
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan fenomenologi studi komparatif penelitian dengan analisis data kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup Masjid. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Bungin 2007) Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian fenomenologi adalah penyelidikan dan penggambaran langsung suatu fenomena sosial tertentu sebagai pengalaman yang dibuat secara sadar, tanpa memiliki landasan teori tentang penjelasan kausal atau realitas objektif. Sehingga dengan kata lain, fenomenologi berusaha memahami bagaimana orang membangun makna dari hal-hal yang terjadi. Menggunakan fenomenologi karena fenomenologi mengajak untuk melihat suatu fenomena. Dengan membuka diri, kita

membiarkan fenomena itu menampakkan diri. Bagaimanapun ia bercerita, harus memahaminya dalam perspektif fenomena itu sendiri (Hasbiyansyah 2008) Untuk lebih jelasnya, Fenomenologi merupakan studi yang menempatkan pengalaman sadar seseorang dari perspektif orang yang mengalami kehidupannya di dunia. Ada tiga prinsip dasar fenomenologi. Pertama, pengetahuan haruslah sadar. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman, tetapi diekspresikan dalam pengalaman sadar itu sendiri. Kedua, makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang. Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu objek akan menentukan makna tersebut. Seikat kunci misalnya, akan menjadi penindih kertas ketika seseorang melihat potensinya sebagai benda yang cukup berat. Ketiga, bahasa merupakan perantara bagi munculnya makna. Kita mengalami banyak hal melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengungkapkan hal-hal tersebut. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah kunci karena berbagai atribut yang diberikan pada benda tersebut: untuk mengunci, membuka, terbuat dari logam, berat, dan sebagainya. (Daryanto 2016)

Dalam penelitian ini penulis membandingkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan. Penelitian akan dilakukan di Masjid Raya Al-Mashun, Jalan Sisimangaraja No.61, Medan Kota,

Medan, Sumatera Utara. Dan di Masjid Agung Medan, Jalan Diponegoro No.16, Medan, Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. (Jogiyanto 2007) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait di masjid tersebut. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui catatan-catatan atau dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Sekretaris Umum sekaligus Imam Besar Takmir Masjid Raya Al-Mashun yaitu Bapak Ir. H. Zaini Hafiz, Wakil Sekretaris Umum Takmir Masjid Agung yaitu Bapak Drs. H. Abdullah Matondang dan Bapak Mukhlis Siregar, SH serta para pengurus Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan. Objek penelitian yang dimaksud adalah akuntabilitas publik dan pengelolaan keuangan Masjid Al-Mashun dan Masjid Agung Medan. (Wawancara, Pengurus Masjid, Medan, 2022) Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan observasi.

Kerangka teoritis merupakan suatu pola yang menjelaskan alur/sistematis yang dibangun berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Fenomenologi. Penelitian ini melibatkan data kualitatif, serta menggunakan *Logic Analytic*. Penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang praktik akuntansi di entitas pelaporan yakni Masjid, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kerangka teoritis sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Mashun merupakan sebuah masjid yang terletak di Kota Medan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini menjadi salah satu bangunan dengan interior dan eksterior yang sangat megah. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India dan Spanyol. Terlebih dengan bentuknya yang

membentuk segi delapan dan memiliki sayap pada bagian selatan, timur, utara, dan barat. Hal ini menjadikan masjid ini menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Masjid Raya Al-Mashun memiliki luas tanah 13.200 m², luas bangunan 5.000 m², dan memiliki daya tampung jama'ah 1.500 jama'ah.

Masjid Agung Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1967. Masjid Agung Sumatera Utara merupakan kategori Masjid Besar. Masjid Agung Sumatera Utara beralamat di Jalan Diponegoro No. 26 Kelurahan Madras Hulu Kec. Meda Polonia Kota Medan Sumatera Utara. Masjid Agung Sumatera Utara memiliki luas tanah 5.000 m², luas bangunan 10.700 m² dengan status tanah SHM. Masjid Agung Sumatera Utara memiliki jumlah jama'ah > 200 orang, jumlah muazin 48 orang, jumlah remaja 476 orang dan jumlah Khotib 5 orang.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif

Berkaitan dengan akuntansi, Islam sudah menerapkannya pada masa Rasulullah SAW seperti perhitungan zakat, utang, pencatatan uang masuk dan keluar dalam perdagangan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 mencerminkan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan keagamaan

menjadi lebih baik seperti di tempat ibadah (Masjid) dan pasar perdagangan. Akuntansi dalam entitas tempat ibadah (Masjid) pencatatan laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja para pengurus masjid selaku Takmir dan Bendahara Masjid. Pernyataan senada disampaikan juga oleh Sekretaris Umum sekaligus Imam Besar Takmir Masjid Raya Al-Mashun yaitu Bapak Ir. H. Zaini Hafiz,

"Ilmu akuntansi ya dibutuhkan karena di dalam mengelola keuangan masjid menggunakan istilah pembukuan secara tidak langsung mengikuti akuntansi jadi kita mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran tapi sistemnya bulanan bukan sistem kelanjutan atau masih sederhana".

Akuntansi dalam entitas keagamaan seperti dua hal yang tidak memiliki keterkaitan yang baik, bagi orang awam. Namun semakin berkembangnya ilmu akuntansi saat ini dan juga kebutuhan publik akan hal tersebut, maka akuntansi atau pencatatan dengan model tradisional sudah diterapkan banyak entitas keagamaan yang menggunakannya dalam melakukan pencatatan keuangannya. Namun tak sedikit pula entitas keagamaan yang sudah melakukan pencatatan keuangan dengan metode yang diterapkan seperti pada suatu perusahaan dan lainnya. Asalkan pencatatan tersebut digunakan untuk kemajuan entitas keagamaan dan sebenar-benarnya hal itu menjadi sebuah keharusan. Pemisahan kehidupan spiritual dan

keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti Gereja hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Hal senada juga terucap dari pernyataan Sekretaris Umum sekaligus Imam Besar Takmir Masjid Raya Al-Mashun yaitu Bapak Ir. H. Zaini Hafiz.

"Bermanfaat sekali, sebab kalau kita bicara keuangan itu kan istilah orang Jawa mengatakan riwil (rawan), kalau laporannya tidak baik, tidak mudah dibaca, tidak semua jama'ah mengerti, yang seperti itu pasti akan menjadi fitnah, dan kita tidak menginginkan itu, jadi manfaat dari laporan keuangan secara akuntansi atau dalam keuangan itu sangat penting sekali supaya mudah dipahami oleh semua pengurus dan jama'ah."

Kalimat yang terucap diatas mengungkapkan bahwa pencatatan keuangan dalam Masjid sangat bermanfaat bagi kelancaran tugas Takmir Masjid. Pencatatan tersebut juga sebagai bentuk kinerja Takmir Masjid karena telah diamanahkan oleh para jama'ah dan sebagai bukti keuangan sudah dicatatn dengan sebaik dan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi fitnah atau kecurigaan.

Akuntabilitas menunjukan bentuk kewajiban bagi pengurus masjid (pihak yang penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya) untuk melaporkan dan mengungkapkan

sumber dan penggunaan keuangan kepada pemberi dana (Jama'ah). Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan tidak memiliki Standard Operation Procedure (SOP) secara tertulis layaknya sebuah organisasi lain dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Kendati kemudian, pihak pengurus Masjid yang bertanggung jawab tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam mengelola keuangan Masjid. Sumber keuangan kedua masjid tersebut berasal dari sumbangan masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at.

Selain itu, kedua masjid tersebut juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq untuk mendo'akan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan Masjid Agung Medan juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid, sedangkan Masjid Raya Al-Mashun tidak sedang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada dana yang berasal dari Jama'ah (publik). Kedua pengurus masjid tersebut menerbitkan laporan keuangan atas dana yang telah dikelolanya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh masjid pada umumnya dalam bentuk sederhana yaitu laporan

penerimaan dan pengeluaran kas bentuk pencatatan single entry. Pembuatan laporan keuangan merupakan tanggung jawab bendahara pengurus masjid.

Dalam pembuatan laporan keuangan, kedua masjid tersebut memiliki format tersendiri secara komputerisasi. Umumnya laporan keuangan masjid berisikan nomor, tanggal, uraian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Kedua Masjid tersebut berkewajiban melaporkan laporan keuangannya pada Jama'ah selaku pemberi dana dan kepada internal kepengurusan Masjid sebagai bentuk tanggung jawab bendahara Masjid. Pelaporan kepada Jama'ah dilakukan dengan cara mempublikasikan kondisi keuangan Masjid pada Jama'ah dalam kurun waktu tertentu, baik berupa laporan keuangan mingguan maupun laporan keuangan bulanan. Selain kepada Jama'ah, Masjid juga berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan pada pihak tertentu, Masjid Raya Al-Mashun melaporkan laporan keuangannya kepada Kesultanan Istana Maimun, sedangkan Masjid Agung Medan melaporkan laporan keuangannya kepada penasehat dan pengawas Masjid Agung Medan.

Laporan keuangan Masjid Agung Medan tiap dua bulan sekali melakukan audit secara formal sebagaimana laporan keuangan suatu organisasi lain yang diaudit oleh seorang Akuntan Publik. Sedangkan Laporan keuangan Masjid Raya Al-Mashun belum pernah

diaudit, namun pengurus Masjid mengatakan bahwa kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh pengurus bisa secara langsung dinilai oleh Jama'ah dan internal kepengurusan Masjid saat laporan keuangan tersebut dipublikasikan secara transparan. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid juga bisa dinilai kewajarannya oleh pihak-pihak yang mendapatkan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerima Kas Masjid umumnya berasal dari: a. Tabungan amal yang disediakan oleh pengurus untuk para Jama'ah yang ingin menyumbang kepada Masjid b. Sumbangan yang secara langsung diserahkan oleh Jama'ah atau donatur lainnya melalui pengurus Masjid. c. Penerimaan melalui rekening Bank.

Pengelolaan Keuangan Masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif

Untuk penerimaan kas, Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan menerima sumbangan langsung dari Jama'ah atau donatur lainnya hanya boleh diterima oleh bendahara atau ketua pengurus masjid. Kedua Masjid tersebut memiliki kas yang disimpan pada brankas Masjid untuk digunakan pada keperluan rutin yang tidak membutuhkan biaya terlalu signifikan. Jika diperlukan, Bendahara Masjid dibolehkan untuk langsung mengeluarkan kas pada brankas. Selanjutnya, Masjid juga memiliki kas yang disimpan pada rekening tabungan

Bank yang memiliki dua spesimen atau lebih. Sehingga untuk menggunakan kas harus melalui persetujuan spesimen yang bersangkutan. Bank yang digunakan Masjid Agung Medan untuk menyimpan kas Masjid adalah Bank Sumut Syari'ah dan BNI Syari'ah. Sedangkan untuk Masjid Raya Al-Mashun tidak melampirkan Bank apa saja yang digunakan untuk menyimpan kas Masjid. Untuk pengeluaran kas, Masjid Raya Al-Mashun tiap bulannya mengeluarkan dana untuk memberikan gaji para pengurus masjid, sedangkan Masjid Agung Medan tidak ada memberikan gaji untuk para pengurus masjid tetapi Masjid Agung Medan memberikan gaji untuk para petugas kebersihan Masjid. Apabila terjadi kejadian kesalahan yang terjadi di Masjid seperti saat hilangnya kotak infaq, para pengurus tidak saling menyalahkan satu sama lain siapa yang bertanggungjawab atau menuduh satu sama lain, akan tetapi bermusyawarah bersama mencari solusi supaya tidak terjadi kehilangan kotak infaq dan masalah yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa sistem tata kelola Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan masih sederhana, namun tata kelola sangat syari'ah. Kedua Masjid tersebut lebih mengedepankan kejujuran dan amanah untuk bertanggung jawab kepada Allah. Atas dasar ini mereka melaksanakan sistem tata kelola Masjid dengan penuh kejujuran, sehingga transparansi dan

akuntabilitas keuangan masjid tetap efektif dan efisien.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif

Transparansi pengelolaan keuangan sangat penting bagi seluruh pengurus Masjid. Tujuannya adanya untuk membangun kepercayaan jama'ah kepada masjid. Setiap jama'ah masjid memiliki hak yang sama untuk mengetahui kondisi keuangan Masjid, sedangkan setiap pengurus masjid wajib menyampaikan informasi tersebut kepada jama'ah Masjid. Bendahara Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas harian Masjid secara manual. Kemudian setiap hari Jum'at, penerimaan dan pengeluaran yang telah dicatat secara manual akan dirangkum dan diketik dengan format yang telah ada untuk membuat laporan keuangan Masjid dan akan diumumkan kepada Jama'ah secara lisan. Laporan ini selanjutnya akan ditempel di sisi kanan dan kiri Masjid agar Jama'ah bisa melihatnya. Dalam wawancara Wakil Sekretaris Umum Takmir Masjid Agung yaitu Bapak Drs. H. Abdullah Matondang mengucapkan hal sebagai berikut:

"Setiap pengurus mengetahui tentang pencatatan tersebut, karena setiap rapat diberi tahu, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi setiap akan mengeluarkan uang, biasanya

pengurus mengadakan rapat, kemudian setelah setiap kegunaan-kegunaan juga dilaporkan, misalnya akan membangun itu pengurus mengadakan rapat dulu. Nanti begitu habis berapa, kita laporkan setelah selesai pembangunan itu, sehingga keadaan uang itu akan terpantau terus baik yang ada, keluar berapa, kemudian masih ada berapa, itu pengurus harus tahu itu. Yang jelas pengurus harus tahu dan kemudian warga juga secara terbuka harus diberi pengertian melalui papan-papan yang ada di Masjid, itu cara kita mensosialisasikan keadaan keuangan Masjid tersebut." (Pengurus Masjid, Wawancara 2022, 13;30)

Setiap hari jum'at, pengurus Masjid mengumumkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh oleh Masjid selama kurun waktu 1 minggu dan saldo kas yang dimiliki Masjid saat itu, akan tetapi Masjid Raya Al-Mashun kadang mengumumkan tidak menentu, Masjid Raya Al-Mashun mengumumkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh oleh Masjid selama kurun waktu seminggu sekali atau sebulan sekali. Pengumuman ini dilakukan secara lisan oleh pengurus kepada Jama'ah sebelum pelaksanaan shalat jum'at. Publikasi kondisi keuangan lainnya yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan adalah laporan keuangan mingguan yang ditempel pada papan pengumuman atau dinding Masjid.

Masjid tidak memiliki sarana khusus untuk penyampaian saran dan

kritik dari Jama'ah. Jika jama'ah ingin menyampaikan saran atau kritik, maka Jama'ah bisa menyampaikan secara langsung secara lisan kepada pengurus. Pengurus masjid bisa memberikan tanggapan secara langsung atau mendiskusikan saran dan kritik tersebut bersama dengan pengurus lainnya. Saran dan kritik akan dipertimbangkan oleh pengurus, apabila sesuai maka akan diterima. Selain secara lisan, terdapat juga jama'ah yang memberikan saran dan kritik secara tulisan melalui kotak tabungan Amal.

PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis, namun dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kepengurusan Masjid. pengurus membuat Laporan Keuangan Masjid berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk *single entry* yang diserahkan oleh pengurus kepada jama'ah dan internal kepengurusan, serta beberapa pihak tertentu lainnya. Laporan keuangan Masjid Agung diaudit oleh akuntan publik dua bulan sekali, sedangkan laporan keuangan Masjid Raya Al-Mashun belum pernah diaudit, namun kewajaran laporan bisa dinilai

oleh Jama'ah secara langsung. Terdapat pemisahan fungsi pada pengeluaran kas Masjid yang disimpan pada rekening bank. Tiap bulan Masjid Raya Al-Mashun memberi gaji atau upah kepada pengurus masjid, sedangkan Masjid Agung tidak memberi gaji atau upah kepada pengurus masjid. Transparansi pengelolaan keuangan masjid di Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif ialah pengelolaan keuangan Masjid sudah transparan dengan dapat diaksesnya laporan Masjid oleh Jama'ah melalui publikasi dan media yang dilakukan dan disediakan oleh pengurus, pengurus juga menerima saran dan kritik dari Jama'ah. Publikasi kondisi keuangan lainnya yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung Medan adalah laporan keuangan mingguan yang ditempel pada papan pengumuman atau dinding Masjid.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aisyah, Nur. 2019. "Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba." *Skripsi*.
- Ayub, Moh E. 1996. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Yogyakarta: Gema Insani Press. 1996).
- Bahrudin, Ni Luh Gd Erni Sulindawati, Made Aristia Prayudi. 2017. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuang

- an Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan an Jembrana Kabupaten Jembrana" *Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Jurnal* Vol. 8(4): 2017-19.
- Budiman, A. 2011. "Akuntabilitas Lembaga Lembaga Pengelola Dana." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1. 19(1): 2011.
- Bungin, Burhan. 2007. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada."
- Daryanto, Muljo Rahardjo. 2016. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava.
- Dewi, Liana, and Rafliana Mukhtar Renggana. 2022. "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Masjid Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sosial." *Jurnal Ilmiah Pengabdhi* 8(2).
- Haryanti, Susi, and M Elfan Kaubab. 2019. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Wonosobo." *Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No. 1, Oktober 2019 1(1).
- Hasbiyansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Media Tor* 9: 163.
- Ismet Ismatullah, Tina Kartini. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 6: 186-204.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman*
- (Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2007), h. 79.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group,.
- Latif, Abdul. 2014. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Studi Kasus Di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo)." In *Skripsi*,.
- Lufi Aprilia. 2017. "Pengaruh Good University Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)." *Skripsi*: 2017.
- Mahardika, Muhammad, Adi Prasetyo, Firda Ayu Amalia, and Malang. 2022. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* Volume 13 , No. 2, Tahun 13(2): 135-47.
- Maulana, Abrar Fauzi. 2020. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5, No. 2. 5(2): 270-77.
- Muhammad Ahyaruddin, Dkk. 2017. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Mesjid Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Pengabdian Untuk Mu negeRI, VOL. 1, NO.1, MEI* 1(1).
- Mustofa, Budiman. 2007. *Manajemen Masjid*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007).
- Nurlailah, Nurleni dan Madris. 2014. "Akuntabilitas Dan Keuangan

Masjid Di Kecamatan Tubo
Sendana Kabupaten Majene.”
Jurnal Akuntansi. Vol. 4 No. 2 4(2):
2014.

Prabowo, Yulian. 2017. “Tinjauan
Hukum Islam Dalam Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance
Terhadap Efektivitas Kinerja
Aparatur Sipil Negara (Studi Di
Kelurahan Way Dadi Baru).”
Skripsi: 2017.

Raharjo Adisasmita. 2011. “Manajemen
Pemerintahan Daerah
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).” :
2011.

Rahayu, Ruci Arizanda. 2014.
“Tranparansi Dan Akuntabilitas
Pelaporan Keuangan Masjid
Agung Al-Akbar Surabaya.” *Jurnal
Reviu Akuntansi dan Keuangan*
4(2): 631–38.

Rini, Rini. 2018. “Pengelolaan Keuangan
Masjid Di Jabodetabek.” *Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Islam*
6(2): 109–26.

Simanjuntak, D. Anzar dan Januarsi.
2011. 2011. “Akuntabilitas Dan
Pengelolaan Keuangan Di Masjid.
Simposium Nasional Akuntansi
XIV Aceh.” *Simposium Nasional
Akuntansi XIV Aceh* 1(2): 2011.